

GERAKAN LSM KOLING PADA UPAYA KONSERVASI HUTAN DIENG TAHUN 2000-2010

Muntobingul Rojbiyah

Alumni Sosiologi Angkatan 2008 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Email: imoonasa@gmail.com

Abstract

The emergence of various kinds of natural disasters in many parts of the world indicates just how nature has been corrupted and degraded. Environmental degradation that occurs has a lot of movement attracted the attention of environmentalists as well as NGOs. Concern about environmental issues today is nothing new among NGOs. A variety of environmental movement they are doing to realize a sustainable environment. Similarly, NGOs Koling which since 1999 has been struggling in Wonosobo forest management policy. Ideology of the NGO movement is a determination of how they develop strategies and activities in the struggle for environmental issues (forestry) in Wonosobo. With the sociological perspective of social movement paradigm, the research made to analyze how the paradigm of the NGO movement Koling determine the pace of movement is then presented to each program and activity does. The theory used to analyze the theoretical model with the environmental NGO movement Hayden and Mansour Fakhri ideas about the paradigm of NGOs. The final results concluded that: (1) NGO environmental movement Koling is visionary in achieving management natural resources (especially the management of forest resources) based on the empowerment and social welfare, (2) the movements are more likely paradigmatic moderate/ reformist despite sometimes also paradigmatic liberal/ transformative, (3) the analysis of the concept model of the environmental NGO movement Heyden, Koling more closely to the model of instrumental strategies and sub-cultural.

Key words: Model of movement, dynamics of movement, NGOs Koling, and Dieng's conservation

Intisari

Munculnya berbagai macam bencana alam di berbagai belahan dunia mengindikasikan akan betapa alam telah rusak dan terdegradasi. Degradasi lingkungan yang terjadi ini telah banyak menarik perhatian para gerakan pemerhati lingkungan termasuk juga kalangan LSM. Concern pada isu lingkungan kini memang bukan hal baru lagi di kalangan LSM. Berbagai gerakan lingkungan mereka lakukan untuk mewujudkan lingkungan yang sustainable. Begitu pula LSM Koling yang sejak tahun 1999 telah berjuang dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan Wonosobo. Ideologi gerakan LSM ini menjadi penentuan bagaimana mereka menyusun strategi dan kegiatan dalam perjuangan isu lingkungan (kehutanan) di Wonosobo. Dengan cara pandang sosiologis yakni paradigma gerakan sosial, penelitian dilakukan guna menganalisa bagaimana paradigma gerakan LSM Koling menentukan gerak langkahnya yang kemudian dipresentasikan pada setiap program dan kegiatan yang dilakukannya. Teori yang dipakai untuk menganalisanya adalah dengan teori model gerakan LSM lingkungan Heyden dan pemikiran Mansour Fakih tentang paradigma LSM. Hasil akhir diperoleh kesimpulan bahwa; (1) LSM Koling adalah gerakan lingkungan yang bervisi pada tercapainya pengelolaan sumber daya alam (khususnya pengelolaan sumber daya hutan) yang berbasis pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, (2) gerakan-gerakannya lebih cenderung berparadigma moderat/reformis meski terkadang juga berparadigma liberal/transformatif, (3) dengan analisis konsep model gerakan NGO lingkungan Heyden, Koling lebih mendekati pada model strategi instrumental dan sub-kultural.

Kata Kunci: Model Gerakan, Dinamika Gerakan, LSM Koling, Konservasi Hutan Dieng

Pendahuluan

Wacana penyelamatan lingkungan di era sekarang ini semakin gencar disosialisasikan. Hal ini disebabkan karena adanya fenomena kerusakan lingkungan yang semakin memprihatinkan. Seperti terjadinya pencemaran air, kepunahan spesies, polusi, terjadi emisi CO₂, hilangnya kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk berlebihan, hilangnya

hutan alam dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan semakin bertambah parah seiring berjalannya industrialisasi di berbagai belahan dunia. Industrialisasi yang bisa dikatakan sebagai salah satu upaya pembangunan ternyata sedikit banyak telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Hal ini disebabkan karena pembangunan dengan menggunakan strategi industrialisasi ini seringkali tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan secara global. Kondisi ini juga didukung dengan adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi yang memudahkan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. John Bellamy dalam "*A Short Economic History of Environment*" menyatakan secara tegas bahwa:

*"Hubungan manusia dengan lingkungannya berada di ambang kritis. Aktivitas perusakan terhadap bumi semakin meningkat dan mengganggu keberlangsungan planet ini, dan pada akhirnya mengancam spesies manusia sendiri."*¹

Sebagai manusia sudah sepatutnya kita peduli dan menjaga keberlangsungan alam di mana tempat kita hidup dan beraktivitas, karena pada dasarnya antara manusia dan alamnya ini terdapat keterkaitan dan keterikatan yang kuat. Anjuran untuk selalu memperhatikan dan peduli lingkungan serta larangan membuat kerusakan di bumi ini juga telah tercantum dalam al-Qur'an Surah Al A'raf [7] Ayat 56-58 dan Surat Ar Rum [30] ayat 41-42.² Di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia beserta makhluk lainnya sudah dijadikan-Nya dengan sempurna, dan sebagai manusia kita memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta ini.

Di Indonesia, pembangunan dengan strategi industrialisasi dimulai tahun 1970-an. Adanya industrialisasi ini pada satu sisi memang memberi dampak positif meski di sisi lain juga memberi dampak negatifnya. Industrialisasi pada saat itu diakui telah merubah sejarah perekonomian Indonesia, tercatat sektor perekonomian mengalami pertumbuhan paling pesat.³ Akan tetapi siapa sangka "keajaiban

1 John Bellamy, *a Short Economic History of Environment*, (New York: Montly Review Press, 1999), hal.11-12

2 Mahmud dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Putra Fajar, 1982)

3 Disebutkan bahwa ekspor kayu bulat pada tahun 1970-an mengalami kenaikan yang dramatis hingga menghasilkan devisa melonjak naik. Selain itu, pada tahun 1979 Indonesia menjadi produsen kayu terbesar di dunia, yangmana menguasai 41% ruang pasar dunia (2,1 miliar dolar). Lihat Charles Victor Barber dan Emily

ekonomi” yang terjadi pada saat itu justru menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Peningkatan perekonomian yang dihasilkan dari menjual aset sumber daya alam yang ada di Indonesia, di mana di sini termasuk SDA sektor kehutanan telah membawa dampak yang cukup serius. Diantaranya adalah kerusakan hutan secara meluas atau bisa kita sebut deforestasi (*deforestation*)⁴.

Kondisi degradasi lingkungan di Indonesia ini ternyata telah menarik perhatian beberapa aktor gerakan lingkungan diantaranya adalah LSM Walhi dan Skephi pada tahun 1980-an.⁵ Munculnya LSM ini dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran para aktivis bahwa pembangunan yang dilakukan meski telah membawa kepada pertumbuhan ekonomi bangsa juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah di Indonesia. Konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak mengindahkan aspek lingkungan, eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan tanpa memikirkan kondisi alam. Oleh karena itu, kemunculan LSM di Indonesia yang fokus pada isu lingkungan ini menginginkan bentuk pembangunan yang memperhatikan lingkungan yang kemudian disebut dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Kiprah LSM dalam upaya pelestarian alam di Indonesia memang tidak dapat diremehkan. Salah satu LSM yang telah menunjukkan aksi yang cukup signifikan adalah LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Walhi yang seringkali beraksi dengan memilih jalan advokasi secara terus menerus memberikan masukan, kritik, bahkan melakukan protes keras terhadap kebijakan pemerintah terkait kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.⁶ Dalam perkembangannya, LSM yang fokus pada isu lingkungan pun mengalami penambahan jumlah dan berkembang pesat hingga pelosok nusantara. Kita bisa menemukan banyak LSM lingkungan kategori besar atau pun kecil sekalipun yang berjuang pada tingkat lokal. LSM pada tingkat lokal biasanya muncul sebagai

Matthews, *Keadaan Hutan Indonesia*. (Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001) hal. 28.

4 Istilah *deforestasi* oleh PBB didefinisikan sebagai suatu kejadian di mana tatkala hutan ditebangi atau dibersihkan untuk dikonversikan penggunaan lahannya untuk sektor di luar kehutanan. Lihat Herman Hidayat, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal 5 dan 90

5 Soeharko, *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintahan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokrasi (1966-2001)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal. 103

6 Tercatat ada beberapa gugatan yang dilakukan Walhi pada periode 1988 - 2002. Lihat <http://www.Walhi.or.id/id/home/sejarah-kami> (Diakses pada 23/05/2011 pukul 21.28 WIB).

wujud reaksi mereka atas kerusakan lingkungan di tempatnya sendiri, sehingga aksi mereka pun lebih fokus pada wilayah sekitar. Sebut saja LSM Koling, organisasi ini adalah salah satu dari gerakan lingkungan lokal di Wonosobo. Kemunculan LSM Koling ini merupakan reaksi dari kondisi kerusakan lingkungan di Wonosobo, terutama kerusakan hutan yang ada di kawasan Dieng.

Permasalahan Lingkungan

Kota Wonosobo yang terletak di Propinsi Jawa Tengah ini memiliki luas lahan 98.500 Ha (3% luas Jawa Tengah) dan memiliki kawasan hutan dengan luas 39.726,3 Ha⁷. Pada dasarnya luas hutan yang dimiliki Wonosobo ini sangatlah luas, sayangnya keberadaan hutan ini tidak selamanya terjaga. Banyak hal yang menjadikan lahan hutan di Wonosobo mengalami deforestasi dan degradasi yang luar biasa, hingga krisis lingkungan pun terjadi yang ditandai dengan terjadinya tanah longsor, pencemaran air dan tanah, serta kerusakan hutan yang akut. Banyak pihak yang berpendapat bahwa kerusakan hutan akut atau deforestasi yang terjadi di Wonosobo adalah akibat dari pemekaran wilayah, konversi hutan ke lahan pertanian, dan *illegal logging*. Di samping itu topografi wilayahnya yang curam hingga memiliki kemiringan tanah 40 derajat dengan ketinggian antara 270 - 2.250 m dpl dan curah hujan relatif tinggi (2.000 - 3.000 mm/th) juga seringkali menyebabkan tanah mengalami erosi dan longsor.

Menanggapi permasalahan lingkungan ini, banyak pihak LSM lingkungan yang membantu proses pemulihan lingkungan di Wonosobo dengan berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. LSM-LSM tersebut diantaranya adalah Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPa), Jaringan Kerja Pendamping Masyarakat (JKPM), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR), *Forest Watch Indonesia (FWI)*, dan yayasan Konservasi Lingkungan (Koling). Dari semua LSM tersebut, Koling adalah satu-satunya LSM yang lahir dan didirikan di Wonosobo. LSM Koling berdiri pada tahun 1999 dengan ketua pertamanya adalah Nugroho. Koling yang tergolong masih muda ini melakukan aksinya bersama LSM-LSM lain yang aktif dalam upaya perbaikan dan penyelamatan hutan Dieng.

⁷ Lihat <http://www.arupa.or.id/download/konspsdhbm.pdf> (Diakses pada 23/05/2011 pukul 21.10 WIB)

Kerusakan Hutan Dieng

Data yang dihimpun Kantor Berita ANTARA, dari total luas Hutan Dieng di Wonosobo dengan luas 4.256,80 ha, sekitar 1.153,10 ha telah mengalami kerusakan.⁸ Hal ini senada dengan data statistik kehutanan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang menyatakan bahwa hutan negara yang berada di Dieng rusaknya sudah mencapai 1.153,10 ha. Banyak factor yang menjadi penyebab kerusakan Hutan Dieng, secara umum disimpulkan ada tiga hal yang melatarbelakanginya yakni:

Penjarahan

Penjarahan yang terjadi di kawasan hutan Dieng ini terjadi sudah sejak lama, akan tetapi laju penjarahan terbesar terjadi pada tahun 1998/1999. Penjarahan hutan tersebut hanya terjadi pada kawasan hutan negara dan tidak terjadi pada kawasan hutan rakyat. Menurut Bupati Wonosobo pada tahun 2001, sampai pada tahun 2001, hutan negara di kabupaten Wonosobo yang telah dijarah seluas $\pm 1.810,3$ ha, jumlah pohon yang hilang sebanyak 245.859 batang, dan nilai kerugiannya sekitar Rp 40,8 milyar. Penjarahan pada awalnya terjadi karena dipicu oleh konflik yang tajam antara perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat yang merasa selalu dipinggirkan memanfaatkan euforia yang ada untuk mencukupi kebutuhannya yang semakin mendesak. Selama ini masyarakat sekitar hutan hanya dapat melihat hutan di dekatnya tampak kaya raya akan sumber daya hutan dan itu selalu ditambang oleh orang lain, tanpa mereka pernah menikmatinya. Masyarakat juga melihat banyak aparat Perhutani yang hidup berkecukupan, sementara mereka yang dekat dengan hutan justru miskin dan tidak dapat mengakses hutan secara leluasa. Pada saat itulah muncul keberanian secara bersama-sama melakukan panen raya kayu yang kemudian disebut penjarahan.

Menurut Irfan Bachtiar,

“Penjarahan oleh masyarakat ini kemudian diikuti dengan okupasi lahan atau penggarapan lahan hutan negara secara massal oleh para petani. Okupasi lahan terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti; (a) euforia reformasi, dimana LSM, akademisi maupun birokrat pada saat itu menggencarkan konsep “forest for people” yang menyebabkan masyarakat salah dalam memaknainya; (b) krisis ekonomi panjang, laju

8 <http://AntaraJateng.com>(Diakses pada 07/02/2012 pukul 10.30 WIB)

pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kepemilikan lahan yang terbatas yang mana tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari juga ikut mendorong aksi penjarahan. Di tambah, kondisi krisis ekonomi tahun 1998 yang berkepanjangan mendorong masyarakat menggarap hutan sebagai alternatif guna menutupi kebutuhan pokok yang melambung tinggi; (c) rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap hutan, kurangnya perhatian Perhutani dalam melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan negara bahkan larangan masyarakat mengakses hutan membuat kesadaran akan kepemilikan hutan rendah. Akibatnya masyarakat merasa tak peduli pada hutan dan enggan menjaga maupun memelihara hutan negara; (d) penegakan hukum yang lemah, selama ini penjarahan terjadi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja tapi juga oknum-oknum Perhutani, dinas kehutanan, polisi hutan maupun oknum lain. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mendapat hukuman yang tegas, ketegasan dari aparat Perhutani juga terkesan biasa-biasa saja terhadap para penggarap illegal. Ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum di kabupaten Wonosobo ini belum benar-benar ditegakkan.”⁹

Pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah ini terjadi akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Kabupaten Wonosobo. Kepadatan penduduk yang selalu bertambah ini senantiasa menambah kebutuhan akan tanah. Tercatat laju pertumbuhan penduduk 10 tahun terakhir yang dapat dilihat dari hasil Sensus Penduduk 2010, menunjukkan laju pertumbuhan penduduk kabupaten Wonosobo selama 10 tahun terakhir ini rata-rata sebesar 0,15 %.¹⁰ Sementara untuk tiga kecamatan yang masuk dalam kawasan Dieng, jumlah penduduk Kecamatan Mojotengah 58.153 jiwa, Kecamatan Kejajar 40.925 jiwa, dan Kecamatan Garung 47.891 jiwa. Kecamatan Garung merupakan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang paling tinggi dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain.

Dari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di tiga kecamatan kawasan Dieng ini menjadikan kebutuhan akan tanah semakin tinggi, baik itu untuk pembangunan rumah maupun lahan pertanian sebagai mata pencaharian. Pemekaran wilayah pun semakin meluas.

9 Baca, Irfan Bachtiar dan Sandi Ari C.N. (eds), *Prosiding Semiloka Temu Inisiatif DPRD se-Jawa dan Madura, Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dalam Rangka Otonomi Daerah*, Wonosobo: 15-17 Maret, (Yogyakarta: Badan Penerbitan Arupa, 2001)

10 -----, 2010, *Laju Pertumbuhan Penduduk Sepuluh Tahun terakhir Capai angka 0,15 %*, dalam <http://www.kabupatenwonosobo.com/index.php?modul=berita&cat=BPesan> (Diakses pada 09/02/2012 pukul 08.29 WIB)

Konversi lahan atau alih fungsi lahan hutan ke lahan pertanian

Masyarakat Wonosobo memiliki budaya pertanian yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan regional Wonosobo tahun 2010.

Tabel 6. Penyumbang PDRB Tahun 2010

No	Sektor	Persentase (%)
1	Pertanian	49%
2	Perdagangan, hotel, restoran	12%
3	Jasa	11%
4	Industri pengolahan	10%
5	Keuangan	6%
6	Angkutan dan komunikasi	6%
7	Bangunan	4%
8	LGA (listrik, gas, air bersih)	1%
9	Pertambangan	1%

Sumber: BPS Wonosobo Tahun 2010 dalam Angka 2011

Tercatat dari pendapatan regional tahun 2010, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB yakni mencapai 49%. Budaya pertanian yang terbesar terdapat di Wonosobo bagian Utara yakni kawasan Dieng. Hal ini karena kawasan Dieng memiliki tekstur tanah yang subur dan sangat cocok ditanami sayur-sayuran. Sehingga mayoritas masyarakat di kawasan Dieng bercocok tanam tanaman semusim seperti Kobis, Wortel, dan Kentang. Dari tanaman-tanaman tersebut, Kentang merupakan komoditas utama bagi mereka. Budidaya tanaman ini sangat diminati karena dapat menghasilkan uang banyak dan dengan masa tanam yang cukup singkat dengan rata-rata masa tanam 3-4 bulan. Dari tanaman-tanaman tersebut masyarakat dapat meraup untung dengan nilai jutaan rupiah.

Konsep Gerakan Sosial

Gerakan sosial

Dalam menjelaskan perihal sebuah gerakan, Giddens (1993)¹¹ telah memperkaya wacana gerakan sosial dengan konsep dari sebuah gerakan sosial. Ia mengatakan bahwa,

11 Fadhilla Putra, dkk., *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, (Malang: PlaCID's dan Averroes Press, 2006), hal. 1

“Gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama; atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.”

Sementara Tarrow (1998)¹² berpendapat bahwa,

“Gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggagalkan kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya.”

Di Indonesia sendiri gerakan sosial bisa dikatakan telah ada semenjak masa penjajahan Belanda dulu, di mana di beberapa titik di tanah nusantara ini terdapat beberapa pemberontakan dari para petani yang merasa kehidupannya terampas oleh para pemerintah kolonial. Menyongsong kemerdekaan pun gerakan-gerakan yang bersifat nasionalis marak tumbuh menjamur di Indonesia pada awal abad ke-20 dan hingga sekarang dimana kemerdekaan telah diraih, dan rezim pun silih berganti mulai dari rezim orde lama, orde baru dan kini era reformasi. Berbagai macam jenis gerakan sosial muncul di Indonesia dengan membawa isu-isu baru seperti gerakan demokrasi, gerakan feminis, gerakan HAM, gerakan lingkungan dan sebagainya.¹³

Selanjutnya, gerakan-gerakan yang muncul pada saat itu mengkoordinasikan diri ke dalam sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas sesuai dengan isu yang diperjuangkan. Lembaga atau organisasi tersebut terwujud pada organisasi non pemerintah (ornop) yang kini pada umumnya disebut Lembaga Swadaya Masyarakat, atau meminjam istilah Lubis (1993)¹⁴ adalah “NGO kecil yang berorientasi aksi”. Jadi, dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa LSM ini merupakan bagian dari macam-macam varian gerakan sosial yang ada di Indonesia.

Menurut Doug McAdam,dkk (2004)¹⁵ bahwa gerakan sosial memiliki siklus kehidupan yakni diciptakan, tumbuh, mencapai sukses atau gagal bahkan terkadang bubar, dan berhenti atau hilang eksistensinya. Begitu juga gerakan-gerakan sosial seperti LSM-LSM

12 Ibid, hal. 1

13 Soeharko, *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintahan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokrasi (1966-2001)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005)

14 Soeharko, *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintahan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokrasi (1966-2001)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005) hal. 89

15 Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 32

yang muncul di Indonesia ini mengalami berbagai pasang surut, nasib sebuah gerakan LSM ini tergantung dari kemampuan aktor gerakan, kekuatan dana dan tentunya situasi politik. Maka, dalam konteks gerakan LSM lingkungan juga tak pelak dari fakta tersebut. Ada kalanya LSM mengalami kejayaan seperti LSM Walhi.¹⁶ Namun, di sisi lain LSM lingkungan yang menjadi bagian dari varian gerakan sosial ini juga ada yang mengalami kemunduran atau bahkan mati tak berbekas karena persoalan intern, dana atau persoalan lainnya.

Gerakan lingkungan

Gerakan lingkungan merupakan bagian dari gerakan sosial yang ada. Gerakan lingkungan ini muncul sebagai reaksi atas kerusakan alam atau krisis ekologi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Krisis ekologi yang terjadi secara global ini menarik perhatian para pemerhati dan pencinta lingkungan baik tingkat internasional maupun lokal dengan membentuk gerakan lingkungan.

Di Indonesia sendiri gerakan lingkungan muncul dan berkembang pada tahun 1980-an dengan ditandai munculnya dua LSM yang saat ini menjadi LSM nasional yakni Walhi dan Skephi. Kemunculan mereka berawal dari adanya kesadaran kritis para aktivis bahwa tendensi (*mainstream*) 'pembangunan' yang digalakkan pemerintah ternyata juga turut menyebabkan krisis lingkungan di Indonesia. Menghadapi masalah tersebut para LSM melakukan berbagai gerakan lingkungan, mulai dari pemberdayaan dari bawah-*grassroots* untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan, advokasi lingkungan guna mempengaruhi kebijakan pembangunan oleh pemerintah, dan bahkan kontra pemerintah jika memang situasi mengharuskan seperti itu. Model-model gerakan yang diterapkan tiap LSM ini berbeda satu sama lain tergantung dari paradigma LSM yang bersangkutan.

Variasi Model Gerakan Lingkungan Heyden

Pembahasan konsep model gerakan lingkungan yang dirumuskan oleh Heyden ada tiga kategori yakni, gerakan instrumental (*the instrumental movement*) yang dekat ke model gerakan reformis, gerakan

¹⁶ Pada tahun 2005 terhitung telah ada di 25 propinsi dengan total 436 organisasi anggota (terhitung Juni 2005) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal dan nasional. Di tingkat internasional, Walhi berkampanye melalui jaringan *Friends of the Earth Internasional* yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 1 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. Lihat <http://www.Walhi.or.id/id/home/sejarah-kami> (Diakses pada 23/05/2011 pukul 21.28 WIB).

kontra-kultural (*the contra-cultural movement*) yang dekat ke model gerakan radikal, dan di tengah-tengah kedua posisi tersebut, yakni gerakan sub-kultural (*the sub-cultural movement*). Rumusan model gerakan lingkungan Heyden selanjutnya dijelaskan secara kompleks dalam studi kasus yang dilakukan Suharko tahun 1998 sebagai berikut:

Pertama, NGO lingkungan dengan model gerakan instrumental (*instrumental movement*) memiliki tujuan yang berada di luar gerakan itu sendiri. Heyden membedakan NGO dengan model gerakan ini ke dalam tiga tipologi yaitu *conservationist, the policy campaigner, dan the mobilisers*.¹⁷

Kedua, NGO Lingkungan dengan model gerakan sub-kultural (*the sub-cultural movement*) mempunyai tujuan yang lebih melekat pada gerakan itu sendiri. Kepedulian dan kegiatan utama dari model gerakan ini adalah mencoba menunjukkan alternatif-alternatif cara hidup yang lebih dekat dan harmonis dengan alam kepada masyarakat. NGO ini tidak berupaya mengubah kebudayaan, tetapi mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan dan menunjukkan beberapa kemungkinan upaya itu di dalam kebudayaan yang ada. Heyden membagi NGO ini ke dalam dua tipe yakni *the educational NGO* dan *the 'alternative-exemplistic'*.¹⁸

Terakhir, NGO Lingkungan dengan model gerakan kontra cultural (*the contra-cultural movement*) memiliki tujuan yang abstrak dan radikal yang berada di luar gerakan itu sendiri. Keberhasilan tidak mudah dicapai oleh NGO ini, karena karakternya yang kurang realistik.

17 1). Konservasionis (*conservationist*), yakni NGO yang memiliki kepedulian utama pada perlindungan alam atau suatu area tertentu. Tipe NGO ini cenderung moderat dalam melakukan pelbagai aktivitas lingkungan. 2). Pengkampanye kebijakan (*the policy campaigners*), yakni NGO yang mencoba mempengaruhi para pembuat kebijakan lingkungan. Kegiatan utamanya adalah mengkampanyekan suatu kebijakan lingkungan. Tipe NGO ini biasanya juga merupakan penasehat dalam pembuatan kebijakan dan secara finansial didukung oleh para pemegang otoritas. 3). Mobilisator (*the mobilisers*), yakni NGO yang aktivitas utamanya menggerakkan publik dalam suatu aksi lingkungan. Aksi ini biasanya ditujukan kepada pemegang otoritas atau pelaku bisnis yang keputusan atau perilakunya membahayakan lingkungan. Lihat Suharko, *Model-model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta*, dalam *Jurnal Sosial dan Politik Fisipol UGM*, Vol.2, No.1, November, 2007, hal. 40-62).

18 1). NGO pendidikan (*the educational NGO*). Tujuan NGO ini adalah mendidik masyarakat atau segmen masyarakat khusus seperti anak-anak tentang masalah lingkungan dan mendorong mereka ke arah perubahan sikap dan perilaku terhadap alam dan lingkungan. 2). NGO dengan alternatif-contoh (*the 'alternative-exemplistic' NGO*). Tujuan utamanya adalah menunjukkan kepada masyarakat contoh-contoh cara hidup alternatif. Cara-cara hidup alternatif itu biasanya tidak sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan tidak memerlukan perubahan kultural yang radikal, tapi lebih pada perubahan dalam sub-kultural saja. Lihat Suharko, *Model-model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta*, dalam *Jurnal Sosial dan Politik Fisipol UGM*, Vol.2, No.1, November, 2007, hal. 40-62).

Gerakan lingkungan utama yang dilakukan adalah menentang setiap bentuk kebudayaan yang merusak Lingkungan. Sebab dari kerusakan lingkungan dilihat sebagai berada dalam masyarakat konsumsi-kapitalistik, teknokratik dan berskala besar.

Model Gerakan LSM Koling

Dalam menganalisa LSM-LSM yang ada di Indonesia terkait model gerakan dan paradigmanya, telah ada klasifikasi-klasifikasi yang dirumuskan oleh Korten (1990) dan Mansur Fakhri (1996). Dari Korten sendiri terkenal dengan Tipologi Universal Korten, yang menyebutkan bahwa ada empat generasi LSM berdasarkan orientasi strategi program pembangunan yang dilakukan. Keempat generasi tersebut adalah generasi “bantuan peringanan dan kesejahteraan”, “generasi pembangunan komunitas”, “generasi pembangunan sistem-sistem berkelanjutan dan gerakan rakyat”. Sementara menurut Mansur Fakhri tipologi paradigma di Indonesia dipilah menjadi tiga yakni *konformisme*, *reformisme*, dan *transformasi*¹⁹. Tipologi ini merupakan hasil reflektif aktivis Indonesia dan telah didasarkan pada perspektif para aktivis tentang perubahan sosial dan pembangunan.

Meskipun telah ada dua teori besar yang mengklasifikasikan tipe gerakan LSM di Indonesia secara detail, akan tetapi kedua teori ini tidak cukup relevan untuk dikontekskan dalam menganalisa LSM gerakan lingkungan, tak terkecuali LSM Koling. Teori Heyden “Model-model Gerakan NGO Lingkungan” adalah lebih relevan untuk melihat model gerakan LSM yang bergerak pada isu-isu lingkungan karena teori ini dikembangkan secara khusus untuk konteks lingkungan.

19 Tipe konformis bisa dikatakan aktivitas LSM ini melakukan pekerjaan atau program kegiatannya tanpa teori, mereka hanya berorientasi proyek dan bekerja sebagai orang yang mengikuti system dan struktur yang ada. Sedangkan tipe reformis cenderung pemikirannya didasarkan pada ideology modernisasi dan developmentalis, dimana focus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Setidaknya paradigmanya ini kritis pada masalah pendekatan dan metodologinya, dimana dilakukan secara bottom-up yang mengedepankan partisipasi masyarakat sehingga tugas utama LSM ini adalah menjadi fasilitator dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mentalitas perilaku masyarakat. Sementara tipe transformatif lebih pada mencari paradigm alternative yang akan mengubah struktur dan superstruktur yang menindas masyarakat serta membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk membangun potensi kemanusiaannya. Mendayagunakan potensi kemanusiaannya supaya dapat menciptakan sejarah mereka sendiri, dan menuju jalan demokratis dalam perubahan social, ekonomi dan politik. Dalam kesimpulan akhir Fakhri menetapkan bahwa kebanyakan LSM di Indonesia masuk dalam tipe reformisme. Lihat, Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Gerakan Lsm Koling pada Upaya Konservasi Hutan Dieng Tahun 2000-2010

Menurut Heyden model gerakan lingkungan dipilah menjadi tiga yakni instrumental, sub-kultural, dan kontra-kultural. Jika disandingkan dengan klasifikasi Mansour Fakih pada pemikiran tipologi LSM-nya, bisa dikatakan gerakan instrumental dan sub-kultural lebih dekat dengan tipe reformis, sementara gerakan kontra-kultural lebih dekat dengan tipe radikal-transformatif.

Sebelum menentukan model gerakan suatu gerakan sosial/LSM, akan lebih baik jika kita mengetahui program-program seperti apa yang dilakukan oleh LSM tersebut. Hal ini dikarenakan program-program tersebut secara tidak langsung akan memetakan dan menggambarkan model seperti apa yang cenderung dipakai. Dalam hal ini, secara sederhana beberapa aksi Koling ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

Tabel 8. Divisi-Divisi Koling dan Aksi Programnya

Divisi-Divisi LSM Koling	Aksi Program
Pengelolaan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi penghijauan, - Tahun 2001-2005 advokasi Perda pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat (PSDHBM), - perencanaan desa wisata Sembungan di Dieng, - Tahun 2006 program pengelolaan sumber daya hutan lestari (PSDHL), - program Kehutanan Jawa.
Pendidikan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2003 - Sarasehan dan pentas wayang Kedu sebagai media penunjang pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati, - Tahun 2002 pendidikan Alternatif Tungku Hemat Energi (THE) - Tahun 2001-2003 pendidikan lingkungan usia dini
Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 1999-2001 dan 2005-2007 pendampingan masyarakat desa hutan, - riset-riset pedesaan, - demo PSDHBM ke masyarakat desa hutan
Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2001-2007 pelatihan dokumentasi dan kampanye lingkungan, - pelatihan Jaringan Kerja Tungku Indonesia (JKTI), - pelatihan koran komunitas.

Sumber: Merupakan hasil elaborasi dan olah data dari hasil wawancara dengan Rofiq Musthofa dan data dokumenter/kearsipan Koling (buku laporan kegiatan)

Dari deskripsi singkat beberapa program divisi Koling, dalam konteks teori Hayden pada LSM Koling tampak ada kecenderungan model gerakan sub-kultural. Ciri-ciri model gerakan sub-kultural ini tampak jelas pada beberapa aksi programnya.

Pertama, pada model gerakan sub-kultural strategi pendidikan dan alternatif-contoh merupakan bagian dari strategi model ini. Sementara strategi ini juga terlihat jelas ada pada program kegiatan yang dilakukan Koling, diantaranya pada pendampingan masyarakat hutan yang juga secara langsung telah memberikan pendidikan beserta pemahaman-pemahaman akan pentingnya menggali dan memanfaatkan potensi alam secara tepat guna. Selain itu juga tampak pada kegiatan-kegiatan alam yang mengikutsertakan anak didik SD-SMP. Kegiatan ini jelas terlihat pula menyampaikan pendidikan untuk peduli dan cinta lingkungan sejak dini. Dengan program ini secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk menjaga lingkungan dan merubah pola perilaku yang merusak dan merugikan lingkungan. Tidak jauh berbeda dari apa yang menjadi tujuan Koling, dalam analisis teori Hayden ini dikatakan mengenai tujuan dari gerakan sub-kultural, khususnya dengan strategi pendidikan, yakni tujuannya mendidik masyarakat atau segmen masyarakat khusus tentang masalah lingkungan dan mendorong mereka ke arah perubahan sikap dan perilaku terhadap alam dan lingkungan.

Kedua, strategi alternatif-contoh juga ditunjukkan dalam program kegiatan yang sering dilakukan divisi pendidikan lingkungan dan divisi pendampingan masyarakat Koling. Strategi alternatif-contoh menurut Heyden fokus utamanya menunjukkan kepada masyarakat akan contoh-contoh cara hidup alternatif. Cara-caranya biasanya tidak sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan tidak memerlukan perubahan kultural yang radikal, tapi lebih pada perubahan dalam sub-kultural saja. Sebagai contoh pendampingan yang dilakukan Koling pada warga Ngalian dan Gunung Tugel di Wonosobo pada tahun 2002. Pada pendampingan ini Koling menunjukkan kepada masyarakat Ngalian dan Gunung Tugel beberapa cara alternatif hidup. Pada konteks ini, masyarakat Ngalian dan Gunung Tugel sangat boros dalam mengkonsumsi bahan bakar kayu yang diperolehnya dari menebang pohon-pohon kayu di hutan. Konsumsi yang berlebihan ini lantaran pekerjaan utama mereka adalah memproduksi gula merah yang pada prakteknya memerlukan tungku besar dan dengan bahan bakar kayu yang besar pula. Dengan pertimbangan tersebut

Koling kemudian memperkenalkan alternatif baru. Caranya dengan memperkenalkan Tungku Hemat Energy (THE), sebuah tungku dengan desain khusus yang sarat hemat bahan bakar namun lebih efisien waktu dan tenaga dibanding tungku sederhana yang selama ini dipakai oleh warga. Tindakan Koling ini secara tidak langsung telah menunjukkan alternatif-alternatif cara hidup yang lebih dekat dan harmonis dengan alam, khususnya alam hutan. Mereka yang tadinya menebang kayu secara besar-besaran untuk bahan bakar tungku kini dengan THE lebih memerlukan kayu yang sedikit. Langkah ini jelas tidak merubah budaya berhutan maupun budaya cara memasak masyarakat Ngalian dan Gunung Tugel, tetapi lebih mendorong mereka untuk lebih peduli dengan lingkungan khususnya keadaan hutan. Setidaknya dengan langkah ini kebiasaan menebang pohon di hutan dengan volume besar akan berkurang.

Meski aksi-aksi program kegiatan Koling ini cenderung masuk model gerakan sub-kultural, akan tetapi ada kalanya Koling juga bisa dikatakan sebuah LSM dengan model gerakan instrumental.

Masih dalam konteks teori model gerakan lingkungan Hayden, pada gerakan instrumental ini Hayden mengklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu; "konservasionis", "pengkampanye kebijakan" dan "mobilisator". Dikatakan pada tipe konservasionis sebuah LSM akan memiliki kepedulian utama pada perlindungan alam atau area alam tertentu. Jika mendasarkan pada teori ini Koling termasuk memiliki kepedulian utama pada perlindungan alam tertentu yakni area hutan di Wonosobo khususnya Hutan Dieng. Kepedulian ini diaktualisasikan dengan melakukan berbagai aktivitas yang cenderung untuk 'safe Dieng' seperti penghijauan Hutan Dieng, konservasi Hutan Dieng, pendampingan kepada masyarakat sekitar hutan yang ditujukan agar masyarakat dapat menggali potensi sumber ekonomi lain disamping potensi hutan. Sehingga hutan tidak lagi menjadi mata pencaharian satu-satunya, yang dikhawatirkan akses masyarakat yang eksploitatif dan berlebihan kepada hutan akan mengurangi tutupan dan kualitas hutan. Selain itu tentunya masih banyak lagi aksi-aksi lainnya yang ditujukan untuk memelihara hutan Dieng. Aksi Koling yang cenderung preservasionis (pemeliharaan) terhadap hutan Dieng ini jelas masuk dalam model gerakan ini.

Di samping aksi preservasionis, kampanye kebijakan juga tidak jarang dilakukan Koling. Kampanye kebijakan ini sering dilakukan pada masa-masa perjuangan mendapat pengesahan Perda PSDHBM

tahun 2001/2002. Dalam konteks analisis Hayden, LSM yang aktif mengkampanyekan kebijakan disebut LSM pengkampanye kebijakan.

Kampanye kebijakan Koling yang sangat menghabiskan waktu lama terjadi pada masa advokasi pengelolaan sumber daya hutan Wonosobo. Advokasi yang dilakukan Koling bersama lembaga lain dan telah mendapat dukungan penuh dari DPRD Wonosobo dan DPRD-DPRD se Jawa-Madura ini telah berhasil melahirkan regulasi baru terkait pengelolaan sumber daya hutan di Wonosobo yang ditandai dengan munculnya Perda Kabupaten Wonosobo No. 22/2001 yang disahkan pada 20 oktober 2002. Keberhasilan advokasi kehutanan ini juga diikuti dengan aksi Koling yang selalu aktif mengkampanyekan Perda PSDHBM ke seluruh penjuru warga desa hutan, aksi ini dilakukan untuk mendapat dukungan penuh dari masyarakat desa hutan dan memberi informasi regulasi pengelolaan hutan Wonosobo yang baru. Demo-demo lingkungan juga tidak jarang dilakukannya. Meski kemudian Perda itu dihapuskan pada tahun 2005 oleh pemerintah pusat dengan berbagai alasan tertentu akan tetapi setidaknya advokasi kehutanan Wonosobo sempat menunjukkan hasil yang luar biasa.

Penutup

Upaya yang dilakukan Koling untuk pemulihan Hutan Dieng adalah dengan strategi-strategi advokasi, konservasi, pendidikan lingkungan, pendampingan dan pemberdayaan. Advokasi dilakukan untuk memperjuangkan hak masyarakat atas hutan supaya akses mereka tetap terbuka sehingga hasil-hasil hutan juga dapat dinikmati masyarakat sekitar tanpa harus merusak hutan seperti *illegal logging* dan pembakaran hutan untuk lahan pertanian.

Konservasi dilakukan guna memulihkan kondisi Hutan Dieng dengan melakukan program penghijauan, rehabilitasi, reboisasi dan program semacamnya yang bersifat "*preservation*" atau pelestarian. Untuk semua itu, juga perlu disampaikan pendidikan lingkungan supaya pemahaman mereka atas lingkungan tertanam dengan baik sehingga pendidikan yang memberi wawasan lingkungan ini dapat merubah dan mengontrol perilaku buruk terhadap alam dan menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Strategi pendidikan lingkungan ini bisa dibilang sebagai langkah preventif atau pencegahan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melakukan pendampingan-pendampingan untuk penduduk sekitar hutan. Ini tak lain bertujuan untuk menanamkan kesadaran lingkungan di

tengah-tengah masyarakat dan membuat mereka lebih berswadaya dan mandiri. Dan yang juga penting adalah merubah *mindset* "bertani" dengan menunjukkan potensi matapencaharian lain seperti dari sektor peternakan dan perikanan serta pemanfaatan sektor pariwisata, mengingat Dieng memiliki banyak kawasan wisata.

Dengan melihat program-program yang dilakukan Kolling dan setelah memetakan jenis-jenis programnya, di mana program-programnya ini merupakan wujud dari implementasi ideologi gerakannya. Maka, dengan pemetaan teori tipe/model gerakan lingkungan Hayden, Kolling termasuk ke dalam tipe LSM yang menggunakan model strategi gerakan instrumental dan sub-kultural. Ciri dari gerakan instrumental adalah mereka (LSM) memainkan peran konservasionis, pengkampanye kebijakan dan moilisator. Sedangkan ciri dari gerakan sub-kultural adalah mereka memainkan peran pendidikan dan alternatif-contoh.

Upaya Kolling terkait konservasi hutan Dieng pada hakikatnya sudah memiliki konsep gerakan yang jelas dan akan memberi hasil yang maksimal. Oleh karena hal ini Kolling harus lebih profesional dan giat dalam melancarkan aksi penyelamatan lingkungan dan perjuangan akan hak-hak masyarakat akan akses sumber daya hutan di Wonosobo. Di samping juga terus melakukan upaya untuk menjadikan masyarakat yang kuat, mandiri dan berswadaya tinggi. Mengingat stakeholder tidak hanya pihak LSM namun juga pihak Perhutani, Dinhut dan masyarakat sekitar maka akan lebih baik jika aksi gerakan Kolling ini diimbangi dengan perubahan sikap dan kebijakan dari para stakeholder lainnya. Seperti Perhutani sebaiknya mengurangi dominasi otoritas pengelolaan sumber daya hutan di Wonosobo pada khususnya dan di Jawa pada umumnya. Serta lebih memperhatikan dan melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam mengelola dan membuat kebijakan SDH. Jangan terlalu berorientasi profit semata dalam mengelola SDH. Selain itu Dinas Kehutanan sebaiknya juga lebih serius dalam menyikapi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di Wonosobo supaya pengelolaan dan pemanfaatan SDH tetap memperhatikan sisi ekologisnya di samping sisi sosial dan ekonomi. Serta harus lebih serius mengevaluasi dan memonitoring program-program yang ditujukan sebagai upaya pemulihan Hutan Dieng. Dan yang menjadi lebih penting adalah masyarakat Wonosobo khususnya masyarakat desa hutan meski mendapat pendampingan juga harus belajar memperjuangkan hak sendiri supaya tidak ketergantungan dan dapat menentukan arah

nasibnya sendiri. Di samping itu meski komoditas pertanian semusim di kawasan Dieng sangat menjanjikan (sehingga kultur bercocok tanam menjadi sangat tinggi), mereka harus merubah *mindset*-nya, dan mulai memperhatikan kondisi lahan yang kritis dengan menanam tanaman keras.

Daftar Bacaan

- Awang, San Afri. (2007). *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bachtiar, Irfan dan Sandi Ari C.N. (ed). 2001. *Prosiding Semiloka Temu Inisiatif DPRD se-Jawa dan Madura, Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dalam Rangka Otonomi Daerah, Wonosobo: 15-17 Maret*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Arupa.
- Bellamy, John, ..., *A Short Economic History of Environment*. New York: Montly Review Press.
- Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Kencana.
- Daymon, Christine & Holloway Immy. (2002). *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*, Penerjemah Cahya Wiratama. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*. Yogyakarta: Bentang.
- Dwidjoseputro. (1990). *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*. Jakarta: Erlangga.
- Fakih, Mansour. (2002). *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial: Studi Tentang Ideologi, Isu Strategi, dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fakih, Mansour. (2008). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Herman. (2011). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Jhon, Clark. (1995). *NGO: Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahmud dkk. (1982). *Al-Qur'an dan Terjemahnya dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Putra Fajar.
- Putra, Fadhillah dkk., 2006. *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: PlaCID's dan Averroes Press.
- Rankin, William and Stephen Croall. (1991). *Ecology for Beginners*. Cambridge: Icon Books Ltd.

- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2004). *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Rustam dkk. (1997). *Agenda : Menyongsong Tahun 2000*. Yogyakarta: Cesda-LP3ES.
- Salim, Emil. (1986). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Salim. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Simon, Hasanu. (1998). *Kerangka Dasar Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan dalam Hasanu Simon, S.A. Awang, D.W. Munggora.Y. Nugroho (eds). Reformasi Pengelolaan sumber Daya Hutan Nasional*. Prosiding Diskusi 22-23 Juni 1998. Yogyakarta: Aditya Medya.
- Soeharko. (2005). *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintahan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokrasi (1966-2001)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Susilo, Rakhmat K.D. (2009). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yin, Robert K. (2000). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo.

Referensi Skripsi, Tesis, Desertasi, Jurnal Ilmiah dan hasil penelitian lainnya.

- Aini, Siti Noor. (2010). "Relasi antara Manusia dengan Kerusakan Alam (Telaah atas Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Quran al-Karim Karya Tantawi Jauhari)", Skripsi. Fakultas Ushuludin. UIN Sunan Kalijaga.
- Andriana, Reni. (2007). "Evaluasi Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo". Tesis. Ilmu Lingkungan. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arupa. (2002). *Asia Forest Network (AFN): Community Forestry Support Project for Southeast Asia*. Yogyakarta: Aliansi Relawan untuk Pencinta Alam.
- Bappeda. (2011). *Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo*.
- BPS. (2011). *Wonosobo Dalam Angka Tahun 2010*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo.
- Charles Victor Barber dan Emily Matthews. (2001). *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: FWI/GFW. (Laporan Penelitian oleh Forest Watch Indonesia bersama Global Forest Watch Washington D.C.).

- Chehafudin, Muhammad. (2007). *Studi Kasus Kehutanan: Pengelolaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Pembangunan Berkelanjutan.
- Christie E., Beta Benita. (2006). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Studi Kasus Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan bersama Masyarakat di KPH Purwodadi, Kabupaten Grobogan". Skripsi. Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Fisipol. UGM Yogyakarta.
- Dinhutbun. (2004). *Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng*. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonosobo.
- Dinhutbun. (2006). *Pendampingan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2005*. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonosobo.
- Fay Chip dan Martua Sirait. (2004). *Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah*, ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2005_3.
- Koling dan FKKM Faswil Jateng. (2001). *Prosiding Rountable Discussion: Pembahasan Usulan Draft Raperda Hutan Kemasyarakatan dan Perusda Kehutanan di Kabupaten Wonosobo*. Lembaga Konservasi Lingkungan Wonosobo.
- Koling. (2002). *Belajar dari Rakyat: Sebuah Agenda Menuju Sustainable Forest Management*. Lembaga Konservasi Lingkungan Wonosobo.
- Koling. (2003). AD/ART No.01/Tap-MB/Koling/IV/2003. Lembaga Konservasi Lingkungan Wonosobo.
- Koling. (2003). Anggota No.02/Tap-MB/Koling/IV/2003. Lembaga Konservasi Lingkungan Wonosobo.
- Koling. (2003). GBHK No.03/Tap-MB/Koling/IV/2003. Lembaga Konservasi Lingkungan Wonosobo.
- Koling. (2003). *Menggelar Mimpi Tentang Kemandirian: Peternakan, Pertanian, Jalan, Hutan, dan Pariwisata*. Lembaga Konservasi Lingkungan Wonosobo.
- Koling. (2003). *Struktur Lembaga Koling No.01/Tap-MB/Koling/IV/2003*. Lembaga Konservasi Lingkungan Wonosobo.
- Pemkab. (2006). *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari Secara Partisipatif dan Terintegrasi di Kabupaten Wonosobo*. Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Pergub. (2009). *Lokasi Pemanfaatan Kawasan Dataran Tinggi Dieng*. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.5 Tahun 2009.

- Putro, Wiyono T. (2006). "Strategi Pengelolaan Hutan di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Ngawi pada Era Otonomi Daerah". Skripsi. Sosiologi. Fakultas Fisipol. UGM Yogyakarta.
- Redjeki, Retno Sri. (2008). "Kajian Pengelolaan Lingkungan Pada Kawasan Gunung Sindoro Sumbing: Studi Kasus di Desa Sigidang dan Desa Butuh Kabupaten Wonosobo". Tesis. Ilmu Lingkungan. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suharko. (1998). Model-model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta, *Jurnal Sosial dan Politik*. Fisipol UGM. Vol.2, No. 1. November, pp. 40-62.
- TKPD. (2008). Tim Kerja Pemulihan Dieng Wonosobo.
- Witono, Toton. (2006). "Relasi Manusia dan Lingkungan beserta Implikasi Ekologisnya: Studi atas Tafsir Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad". Skripsi. Tafsir Hadist. Fakultas Ushuludin. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wiyono. (2001). "Persepsi Pemerintah Daerah Terhadap Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan dalam Rangka Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah". Skripsi. Fakultas Kehutanan. UGM Yogyakarta.

Referensi Internet, Koran dan Media lainnya.

- , 2010, "Laju Pertumbuhan Penduduk Sepuluh Tahun terakhir Capai angka 0,15%", <http://www.kabupatenwonosobo.com/index.php?modul=berita&cat=BPesan> (Diakses pada 09/02/2012 pukul 08.29 WIB).
- Bupati Wonosobo, 2010, "-----", <http://AntaraJateng.com> (Diakses pada 07/02/2012 pukul 10.30 WIB).
- Bupati Wonosobo, 2010, "Warga Dieng Dihimbau Untuk Usaha Tanaman Hutan", <http://vetonews.com/index.php> (Diakses pada 07/02/2012 pukul 10.19 WIB).
- , 2010. "Penelitian Institute Teknologi Lingkungan di Adelaide, Australia Tahun 2010". <http://oxana.blogdetik.com/2010/06/11/10-negara-penyebab-kerusakan-bumi/> (Diakses pada 09/05/2011 pukul 21.08 WIB).
- <http://www.arupa.or.id>
- <http://www.arupa.or.id/download/afn.pdf>
- <http://www.arupa.or.id/download/konspsdhbm.pdf>
- <http://www.walhi.or.id/id/home/sejarah-kami>
- <http://www.wonosobokab.go.id/wonosobo/administrator/>
- Saifullah, 2010, *Paradigma pembangunan Lingkungan Hidup di*

Indonesia dalam http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1629:paradigma-pembangunan-lingkungan-hidup&catid=36:kolom-pr2
(Diakses pada 09/05/2011 pukul 21.16 WIB).